

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL INFRASTRUKTUR TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI)*

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FISCAL STIMULUS POLICY OF INFRASTRUCTURE TO THE ECONOMY OF INDONESIA (SOCIAL ACCOUNTING MATRIX APPROACH)

Hendro Ratnanto

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Jln. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710

E-mail: hendro_ratnanto@yahoo.com

E-mail: hendro.ratnanto@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this research is to determine the effect of fiscal stimulus policy of infrastructure to the economy of Indonesia. Research method used is Social Accounting Matrix (SAM). The simulation result indicates that fiscal stimulus policy of infrastructure has a positive effect to the revenue growth of production factors, households, and production activities. Fiscal stimulus also affect the growth of other sectors outside the infrastructure sector, including mining and quarrying, forestry, and timber industry. Based on a structural path analysis it can be concluded that the global effect of the infrastructure sector to household is carried out through the production factors labour and capital.

Keywords: Fiscal stimulus, Infrastructure, Social Accounting Matrix (SAM)

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan stimulus fiskal infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM). Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan stimulus fiskal infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan faktor produksi, rumah tangga, dan kegiatan produksi. Stimulus fiskal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor lain di luar sektor infrastruktur, antara lain sektor pertambangan dan penggalian, kehutanan, dan industri kayu. Berdasarkan analisis jalur struktural dapat disimpulkan bahwa pengaruh global sektor infrastruktur terhadap rumah tangga adalah melalui faktor produksi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Kata Kunci: Stimulus fiskal, Infrastruktur, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

PENDAHULUAN

Berawal dari krisis *subprime mortgage* dan gejolak finansial di Amerika Serikat yang mengakibatkan perekonomian dunia pada tahun 2008 mengalami krisis global, Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka juga terkena dampak negatif dari pelemahan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,1% pada tahun 2008 setelah sebelumnya mengalami momentum pertumbuhan

positif sebesar 6,3% pada tahun 2007.¹ Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada titik terendah, yaitu sebesar 4,5%.² Menurunnya perekonomian Indonesia selama kurun waktu 2007–2009 terutama disebabkan oleh merosotnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia sehingga berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Desember 2009 mengalami

penurunan sebesar 14,98% dibanding periode yang sama pada tahun 2008. Sementara ekspor nonmigas menurun 9,66% dibanding periode yang sama.³ Dari sisi investasi ketatnya likuiditas di pasar global mengakibatkan semakin sulitnya mendapatkan dana dari luar negeri.¹

Dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari krisis ekonomi global tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan *countercyclical* dengan mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal guna menyelamatkan perekonomian nasional. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan belanja rumah tangga dan dunia usaha. Paket kebijakan stimulus fiskal tersebut selain berisi serangkaian kebijakan subsidi dan insentif pajak juga berisi kebijakan stimulus fiskal infrastruktur yang dialokasikan ke dalam anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada APBN 2009 guna menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan stimulus fiskal infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur padat karya di berbagai bidang, di antaranya bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 883/MK.02/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009 dengan total pagu sebesar Rp12,2 triliun.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan stimulus fiskal infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Sektor-sektor mana saja yang memperoleh manfaat dengan adanya stimulus fiskal tersebut?
3. Bagaimana mekanisme transmisi kebijakan stimulus fiskal infrastruktur tersebut terutama terhadap pendapatan institusi rumah tangga?

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dampak dari stimulus fiskal infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE).
2. Melakukan identifikasi sektor-sektor yang memperoleh manfaat dengan adanya stimulus fiskal tersebut.
3. Melakukan analisis jalur struktural (*Structural Path Analysis*) untuk mengetahui mekanisme transmisi kebijakan stimulus fiskal infrastruktur tersebut terutama terhadap pendapatan institusi rumah tangga.

KERANGKA TEORI

Studi literatur dalam penelitian ini berangkat dari pendapat Keynes yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam perekonomian. Peranan pemerintah adalah untuk menstimulasi permintaan agregat. Kebijakan fiskal harus dapat digunakan sebagai stabilisator tingkat *output* dan *employment*. Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran agar perekonomian dapat keluar dari keterpurukan dan kebijakan ini disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif.⁵

Musgrave⁶ mengelompokkan fungsi pemerintah dalam perekonomian menjadi tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Musgrave juga mengembangkan konsep *merit goods* untuk menjelaskan komoditas-komoditas yang seharusnya disediakan pemerintah meskipun masyarakat tidak memintanya.

Ikhsan, M.⁷ mendefinisikan pengeluaran publik sebagai pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, pengeluaran publik selalu akan berbanding lurus dengan aktivitas atau kegiatan pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, pengeluaran akan semakin besar pula.

Suminto⁸ menjelaskan bahwa APBN merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. APBN

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Menurut Mahi⁹, kebijakan fiskal merupakan suatu terminologi ekonomi yang menjelaskan perilaku dari pemerintah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaannya untuk membiayai belanja pemerintah dalam waktu berjalan dan investasi untuk kebutuhan sosial serta alokasi transfer, baik kepada masyarakat di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan fiskal juga meliputi kebijakan belanja defisit yang dilakukan untuk menstimulasi permintaan barang dan jasa domestik sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Abimanyu¹⁰ menjelaskan bahwa stimulus fiskal adalah bagian dari kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mendorong roda perekonomian sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Pengertian infrastruktur ekonomi menurut Bank Dunia¹¹ meliputi:

- 1) *Public utilities*, yaitu tenaga listrik, telekomunikasi, penyediaan air, sanitasi dan sistem pembuangan air, pengumpulan dan pembuangan sampah dan gas.
- 2) *Public work*, yaitu jalan, bendungan utama, kanal untuk irigasi dan drainase.
- 3) Sektor transportasi lain, yaitu rel kereta api, transportasi perkotaan, pelabuhan dan lapangan terbang.

Menurut Kwik Kian Gie¹², pengertian infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri atas infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Sementara itu, infrastruktur permukiman adalah infrastruktur yang terdiri atas infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah kebijakan stimulus fiskal infrastruktur berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) di mana perekon-

mian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu faktor produksi, institusi, dan kegiatan produksi.

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, yaitu Tabel *Input Output* (I-O) Indonesia tahun 2005 dan sebagai data makro adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2005.¹³ Adapun data mikro yang digunakan adalah Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 883/MK.02/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Tambahan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur dalam Rangka Stimulus Fiskal APBN 2009 dari Kementerian Keuangan.⁴

2. Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Menyusun SNSE menjadi *Social Accounting Matrix* (SAM) Infrastruktur dengan melakukan dekomposisi matriks SNSE. Dekomposisi ini perlu dilakukan mengingat SNSE yang diterbitkan oleh BPS tidak secara spesifik menggambarkan sektor-sektor yang terkait dengan infrastruktur. Metode dekomposisi matriks SNSE menjadi SAM infrastruktur yaitu dengan memunculkan sektor-sektor baru yang terkait dengan infrastruktur dengan menggunakan Tabel *Input Output* sebagai *proxy*-nya. Metode ini mengacu pada penelitian Thorbecke pada tahun 1992 di mana Thorbecke mendisagregasi sektor konstruksi pada SAM Indonesia 1980 menjadi beberapa sektor.¹⁴
- 2) Memetakan (*mapping*) jenis-jenis kegiatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 883/MK.02/2009 ke dalam sektor-sektor SAM Infrastruktur yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan definisi konstruksi pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) BPS. Hasil pemetaan ini selanjutnya akan digunakan sebagai injeksi.
- 3) Melakukan simulasi pengaruh kebijakan stimulus fiskal infrastruktur terhadap perubahan pendapatan faktor produksi,

rumah tangga, dan sektor produksi melalui perhitungan matriks pengganda serta membuat analisis hasil simulasi kebijakan tersebut. Simulasi melalui perhitungan matriks pengganda tersebut dilakukan dengan menggunakan program *Microsoft Excel*.

- 4) Melakukan analisis jalur struktural untuk mengetahui mekanisme transmisi kebijakan stimulus fiskal infrastruktur tersebut ke institusi rumah tangga. Analisis jalur struktural tersebut dilakukan dengan menggunakan program *Matrix Accounts Transformation System (MATS)*.

3. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu dengan menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau disebut juga *Social Accounting Matrix (SAM)*. SNSE merupakan suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang merangkum berbagai variabel ekonomi dan sosial di dalam suatu kerangka data sehingga tidak saja mencakup kinerja ekonomi, seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga interaksi antara kinerja ekonomi dengan kondisi sosial masyarakat, seperti distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan (kesempatan kerja). SNSE disusun untuk dapat menjawab kebutuhan data yang dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan dalam suatu kerangka data yang komprehensif, terintegrasi, dan konsisten. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja merupakan masalah-masalah yang saling terkait antara satu dengan lainnya.¹³

Data Sosial Ekonomi yang terangkum dalam SNSE menggambarkan besarnya pengeluaran dan penerimaan dari setiap agen ekonomi. Perubahan pengeluaran salah satu agen ekonomi, misalnya pemerintah, dapat digunakan sebagai *shock* yang jika disimulasikan dalam kerangka SNSE akan dapat menggambarkan perubahan penerimaan dari agen ekonomi lainnya. Komponen dalam SNSE dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok neraca endogen dan kelompok neraca eksogen. Kelompok neraca endogen terdiri atas

tiga blok, yaitu blok neraca faktor produksi neraca institusi dan neraca sektor produksi. Kerangka dasar SAM dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kerangka dasar pembentukan SAM adalah matriks berukuran 4x4. Baris menunjukkan penerimaan, sedangkan kolom menunjukkan pengeluaran yang masing-masing dihitung dalam satuan moneter. Submatriks T_{ij} digunakan untuk menunjukkan penerimaan neraca baris ke- i dari neraca kolom ke- j . Vektor Y_i menunjukkan total penerimaan neraca baris ke- i . Sebaliknya, vektor Y'_j menunjukkan total pengeluaran neraca kolom ke- j . Sebagaimana ketentuan pada SNSE, vektor Y_i sama dengan vektor Y'_j . Dengan kata lain, Y'_j merupakan vektor transpos dari Y_i untuk setiap $i = j$ ¹⁵.

Dampak kebijakan stimulus fiskal infrastruktur terhadap berbagai sektor dalam suatu perekonomian dapat diketahui melalui perhitungan matriks pengganda SNSE. Metode perhitungan matriks pengganda pada SNSE adalah dengan membagi setiap sel pada matriks T sebagai matriks transaksi antarblok dalam neraca endogen dengan jumlah kolomnya. Kemudian diperoleh matriks baru yang disebut matriks A yang menunjukkan nilai kecenderungan pengeluaran rata-rata (*average expenditure propensity*) yang dinyatakan dalam proporsi atau perbandingan. Elemen A_{ij} yang merupakan hasil pembagian nilai T pada baris ke- i dan kolom ke- j dengan jumlah kolom ke- j dapat ditulis sebagai berikut:

$$A_{ij} = T_{ij}Y_j^{-1} \quad A_{ij} = T_{ij}Y_j^{-1} \quad (1)$$

di mana $Y_j^{-1}Y_j^{-1}$ adalah matriks diagonal dari nilai-nilai jumlah kolom sehingga:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Oleh karena itu, persamaan (1) dapat ditulis kembali dalam bentuk:

$$y = A + x \Leftrightarrow y = (I - A)^{-1}x \Leftrightarrow y = M_a x \quad (3)$$

A berisi koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung perubahan sebuah sektor

Tabel 1. Kerangka Dasar SAM

| | | | | Pengeluaran | | | | |
|------------|----------------|-------------------|---|----------------|-----------|-------------------|----------------|-------|
| | | | | Neraca Endogen | | | Neraca Eksogen | Total |
| | | | | Faktor | Institusi | Kegiatan Produksi | Neraca Lainnya | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penerimaan | Neraca Endogen | Faktor | 1 | 0 | 0 | T_{13} | X_1 | Y_1 |
| | | Institusi | 2 | T_{21} | T_{22} | 0 | X_2 | Y_2 |
| | | Kegiatan Produksi | 3 | 0 | T_{32} | T_{33} | X_3 | Y_3 |
| | Neraca Eksogen | Neraca Lainnya | 4 | L_1 | L_2 | L_3 | t | Y_x |
| | Total | | 5 | Y'_1 | Y'_2 | Y'_3 | Y_x | |

Sumber: Defourny dan Thorbecke (1984), dimodifikasi

terhadap sektor lainnya. Adapun M_a disebut pengganda neraca (*accounting multiplier*) yang menunjukkan pengaruh global dari perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan sistem dalam SNSE. Persamaan ini menjelaskan bahwa pendapatan neraca endogen yang terdiri dari blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi akan berubah sebesar M_a akibat perubahan satu unit neraca eksogen, dengan asumsi bahwa variabel harga diperlakukan secara tetap dan elastisitas pendapatan (pengeluaran) dianggap sama dengan satu.¹⁵

Adapun *Structural Path Analysis* (SPA) adalah metode untuk mengidentifikasi seluruh jaringan yang berisi jalur yang menghubungkan pengaruh suatu sektor pada sektor lainnya dalam suatu sistem sosial ekonomi. Pengaruh dari suatu sektor ke sektor lainnya dapat melalui sebuah jalur dasar (*elementary path*) atau sirkuit (*circuit*). SPA mengenal tiga jenis pengaruh, yaitu pengaruh langsung (*direct influence*), pengaruh total (*total influence*), dan pengaruh global (*global influence*).¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan dekomposisi terhadap sektor-sektor yang terkait dengan infrastruktur, diperoleh sebuah SAM infrastruktur 58 sektor yang terdiri atas 17 sektor blok faktor produksi, 12 sektor

blok institusi, dan 29 sektor blok sektor produksi. Pada blok sektor produksi sektor listrik, gas dan air bersih diuraikan menjadi sektor listrik dan gas dan sektor air bersih, sedangkan sektor konstruksi diuraikan menjadi sektor bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, sektor prasarana pertanian, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan, sektor bangunan dan instalasi listrik, gas dan air bersih dan komunikasi dan sektor bangunan lainnya sebagaimana terlihat pada matriks 2.

Tahap berikutnya adalah melakukan pemetaan terhadap alokasi anggaran kegiatan yang termasuk dalam kebijakan stimulus fiskal infrastruktur (lihat Lampiran) sehingga diperoleh klasifikasi sebagaimana Tabel 3.

Alokasi anggaran yang digunakan sebagai *shock* hanya alokasi anggaran kegiatan infrastruktur, tidak termasuk kegiatan nonfisik seperti pelatihan, subsidi, dan penyertaan modal yang juga tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut. Normalisasi nilai injeksi perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan nilai riil SNSE 2005 dengan nilai riil stimulus fiskal 2009. Pengaruh sebenarnya dari kebijakan tersebut dapat dianalisis pada saat dilakukan injeksi nilai stimulus fiskal tersebut ke dalam matriks M_a . Adapun hasilnya adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kebijakan stimulus fiskal infrastruktur mengakibatkan total pendapatan faktor produksi mengalami

Matriks 2. SAM Infrastruktur

| | | | | Uraian | Kode | |
|--|--------------------|--|--|--|------|----|
| Faktor produksi | Tenaga kerja | Pertanian | Penerima upah dan gaji | Desa | 1 | |
| | | | | Kota | 2 | |
| | | | Bukan penerima upah dan gaji | Desa | 3 | |
| | | | | Kota | 4 | |
| | | Produksi, operator angkutan, manual dan buruh kasar | Penerima upah dan gaji | Desa | 5 | |
| | | | | Kota | 6 | |
| | | | Bukan penerima upah dan gaji | Desa | 7 | |
| | | | | Kota | 8 | |
| | | Tata usaha, penjualan, jasa jasa | Penerima upah dan gaji | Desa | 9 | |
| | | | | Kota | 10 | |
| | | | Bukan penerima upah dan gaji | Desa | 11 | |
| | | | | Kota | 12 | |
| | | Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi | Penerima upah dan gaji | Desa | 13 | |
| | | | | Kota | 14 | |
| | | | Bukan penerima upah dan gaji | Desa | 15 | |
| | | | | Kota | 16 | |
| | Bukan tenaga kerja | | | | | 17 |
| Institusi | Rumah tangga | Pertanian | Buruh | | 18 | |
| | | | Pengusaha pertanian | Pengusaha memiliki lahan 0,000 ha–0,500 ha | | 19 |
| | | | | Pengusaha memiliki lahan 0,501 ha–1,000 ha | | 20 |
| | | Pengusaha memiliki lahan 1,000 ha lebih | | 21 | | |
| | | Bukan pertanian | Pedesaan | Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar | | 22 |
| | | | | Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas | | 23 |
| | Perkotaan | | Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas | | 24 | |
| | | Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar | | 25 | | |
| | | Bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas | | 26 | | |
| | | | Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas | | 27 | |
| | Perusahaan | | | | | 28 |
| | Pemerintah | | | | | 29 |
| | Sektor produksi | Pertanian tanaman pangan | | | | 30 |
| Pertanian tanaman lainnya (Perkebunan) | | | | 31 | | |
| Pternakan dan hasil-hasilnya | | | | 32 | | |
| Kehutanan dan perburuan | | | | 33 | | |
| Perikanan | | | | 34 | | |
| Pertambangan batu bara, biji logam, minyak, dan gas bumi | | | | 35 | | |
| Pertambangan dan penggalian lainnya | | | | 36 | | |
| Industri makanan, minuman, dan tembakau | | | | 37 | | |
| Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit | | | | 38 | | |
| Industri kayu dan barang-barang dari kayu | | | | 39 | | |
| Industri kertas dan logam | | | | 40 | | |
| Industri kimia, logam dasar, pupuk, dan sejenisnya | | | | 41 | | |
| Listrik dan gas | | | | 42 | | |
| Air bersih | | | | 43 | | |
| Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal | | | | 44 | | |

| | |
|---|----|
| Prasarana pertanian | 45 |
| Jalan, jembatan dan pelabuhan | 46 |
| Bangunan dan instalasi listrik, gas dan air bersih dan komunikasi | 47 |
| Bangunan lainnya | 48 |
| Perdagangan | 49 |
| Restoran | 50 |
| Hotel | 51 |
| Angkutan darat | 52 |
| Angkutan udara, air, dan komunikasi | 53 |
| Jasa penunjang angkutan dan pergudangan | 54 |
| Bank dan asuransi | 55 |
| Real estate dan jasa perusahaan | 56 |
| Pemerintahan, jasa sosial dan kebudayaan | 57 |
| Jasa perseorangan, rumah tangga dan lainnya | 58 |

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3. Klasifikasi Stimulus Fiskal Infrastruktur

| Kode | Sektor | Nilai (Rp.) |
|------|---|---------------------------|
| 44 | Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal | 1.799.000.000.000 |
| 45 | Prasarana Pertanian | 2.235.000.000.000 |
| 46 | Jalan, Jembatan dan Pelabuhan | 5.808.030.000.000 |
| 47 | Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas dan Air Bersih dan Komunikasi | 874.970.000.000 |
| 48 | Bangunan Lainnya | 318.000.000.000 |
| | Jumlah Total | 11.035.000.000.000 |

Sumber: Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 883/MK.02/2009 tentang Tambahan Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Dalam Rangka Stimulus Fiskal APBN 2009, diolah

pertumbuhan sebesar 0,40% atau mengalami kenaikan sebesar 11305,2 miliar. Sektor-sektor pada blok faktor produksi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah faktor produksi tenaga kerja produksi, operator angkutan, manual dan buruh kasar penerima upah dan gaji di desa (kode sektor 5) dengan pertumbuhan sebesar 0,63% atau meningkat sebesar 686,8 miliar. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dialami oleh faktor produksi tenaga kerja produksi, operator angkutan, manual dan buruh kasar bukan penerima upah dan gaji di kota (kode sektor 8) sebesar 0,57% atau mengalami kenaikan sebesar 372,0 miliar. Faktor produksi yang mengalami pertumbuhan terbesar ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi bukan penerima upah dan gaji di desa (kode sektor 15) yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,56% atau mengalami peningkatan sebesar 41,8 miliar. Dengan demikian, dapat

diketahui bahwa kebijakan stimulus fiskal infrastruktur berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja produksi, baik yang ada di desa maupun di kota. Pembangunan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja mulai dari tingkat perencanaan, tenaga administrasi, teknisi, pengawas lapangan, operator alat berat hingga buruh kasar sehingga wajar jika pendapatan tenaga kerja pada sektor itu mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kebijakan stimulus fiskal infrastruktur mengakibatkan institusi mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% atau total pendapatan mengalami peningkatan sebesar 13922,4 miliar. Pertumbuhan pendapatan rumah tangga tertinggi dialami oleh rumah tangga bukan pertanian pedesaan pengusaha bebas golongan rendah, tata usaha dan sejenisnya (kode sektor 22) sebesar 0,41% atau meningkat sebesar 1223,1 miliar dan rumah tangga bukan pertanian perkotaan pengusaha bebas golongan

rendah, tata usaha dan sejenisnya (kode sektor 25) sebesar 0,41% atau naik sebesar 1607,9 miliar. Sementara itu, pertumbuhan terendah dialami oleh institusi pemerintah (kode sektor 29) yang hanya tumbuh sebesar 0,25% atau meningkat sebesar 1669,2 miliar. Secara umum dapat diketahui bahwa kebijakan stimulus fiskal infrastruktur mengakibatkan peningkatan pendapatan setiap golongan rumah tangga, kecuali institusi pemerintah, dengan distribusi yang relatif merata, yaitu antara 0,34% sampai dengan 0,41%. Hal ini cukup logis mengingat pembangunan infrastruktur memerlukan bahan baku, sedangkan bahan baku tersebut disediakan

oleh para pengusaha, baik yang ada di desa maupun di kota sehingga wajar apabila para pengusaha menikmati manfaat adanya stimulus fiskal tersebut.

Tabel 6 menunjukkan bahwa total pendapatan sektor produksi mengalami peningkatan sebesar 26516,8 miliar atau tumbuh sekitar 0,43%. Adapun sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan (kode sektor 46) sebesar 4164,7 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,42%, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor prasarana pertanian (kode sektor 45) yang meningkat sebesar 1603,0 miliar atau mengalami pertum-

Tabel 4. Pengaruh Stimulus Fiskal Infrastruktur terhadap Pendapatan Faktor Produksi (dalam Miliar Rp)

| Sektor | | Kondisi Awal | Perubahan | |
|---|------|------------------|----------------|-------------|
| Nama | Kode | | Nilai | % |
| Tenaga Kerja Pertanian Penerima Upah dan Gaji di Desa | 1 | 61273,8 | 218,5 | 0,36 |
| Tenaga Kerja Pertanian Penerima Upah dan Gaji di Kota | 2 | 15214,9 | 56,1 | 0,37 |
| Tenaga Kerja Pertanian Bukan Penerima Upah dan Gaji di Desa | 3 | 189306,4 | 668,2 | 0,35 |
| Tenaga Kerja Pertanian Bukan Penerima Upah dan Gaji di Kota | 4 | 18552,9 | 67,1 | 0,36 |
| Tenaga Kerja Produksi, Operator Angkutan, Manual dan Buruh Kasar Penerima Upah dan Gaji di Desa | 5 | 108246,0 | 686,8 | 0,63 |
| Tenaga Kerja Produksi, Operator Angkutan, Manual dan Buruh Kasar Penerima Upah dan Gaji di Kota | 6 | 224459,4 | 1115,9 | 0,50 |
| Tenaga Kerja Produksi, Operator Angkutan, Manual dan Buruh Kasar Bukan Penerima Upah dan Gaji di Desa | 7 | 80193,4 | 423,4 | 0,53 |
| Tenaga Kerja Produksi, Operator Angkutan, Manual dan Buruh Kasar Bukan Penerima Upah dan Gaji di Kota | 8 | 65442,4 | 372,0 | 0,57 |
| Tenaga Kerja Tata Usaha, Penjualan, Jasa jasa Penerima Upah dan Gaji di Desa | 9 | 49855,1 | 166,4 | 0,33 |
| Tenaga Kerja Tata Usaha, Penjualan, Jasa jasa Penerima Upah dan Gaji di Kota | 10 | 267174,2 | 924,8 | 0,35 |
| Tenaga Kerja Tata Usaha, Penjualan, Jasa jasa Bukan Penerima Upah dan Gaji di Desa | 11 | 81012,0 | 250,9 | 0,31 |
| Tenaga Kerja Tata Usaha, Penjualan, Jasa jasa Bukan Penerima Upah dan Gaji di Kota | 12 | 143934,3 | 455,0 | 0,32 |
| Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional dan Teknisi Penerima Upah dan Gaji di Desa | 13 | 39306,4 | 133,0 | 0,34 |
| Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional dan Teknisi Penerima Upah dan Gaji di Kota | 14 | 117887,1 | 461,9 | 0,39 |
| Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional dan Teknisi Bukan Penerima Upah dan Gaji di Desa | 15 | 7444,6 | 41,8 | 0,56 |
| Tenaga Kerja Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional dan Teknisi Bukan Penerima Upah dan Gaji di Kota | 16 | 18074,6 | 91,3 | 0,51 |
| Bukan Tenaga Kerja | 17 | 1346454,3 | 5171,9 | 0,38 |
| Total | | 2833831,9 | 11305,2 | 0,40 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5. Pengaruh Stimulus Fiskal terhadap Pendapatan Institusi (dalam Miliar Rp)

| Sektor | | Kondisi Awal | Perubahan | |
|--|------|------------------|----------------|-------------|
| Nama | Kode | | Nilai | % |
| Rumah Tangga Pertanian Buruh | 18 | 136485,9 | 458,0 | 0,34 |
| Rumah Tangga Pertanian Pengusaha Pertanian Memiliki Tanah 0,000 ha–0,500 ha | 19 | 205435,8 | 731,8 | 0,36 |
| Rumah Tangga Pertanian Pengusaha Pertanian Memiliki Tanah 0,501 ha–1,000 ha | 20 | 116075,9 | 442,2 | 0,38 |
| Rumah Tangga Pertanian Pengusaha Pertanian Memiliki Tanah 1,000 ha lebih | 21 | 113850,7 | 417,1 | 0,37 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Pedesaan Pengusaha Bebas Gol. Rendah, Tata Usaha, dan sejenisnya | 22 | 298378,5 | 1223,1 | 0,41 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Pedesaan Bukan Angkatan Kerja dan Gol. Tidak Jelas | 23 | 99183,2 | 390,8 | 0,39 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Pedesaan Pengusaha Bebas Gol. Atas dan sejenisnya | 24 | 250123,8 | 951,2 | 0,38 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Perkotaan Pengusaha Bebas Gol, Rendah, Tata Usaha, dan sejenisnya | 25 | 387982,1 | 1607,9 | 0,41 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Perkotaan Bukan Angkatan Kerja dan Gol. Tidak Jelas | 26 | 136523,0 | 532,5 | 0,39 |
| Rumah Tangga Bukan Pertanian Perkotaan Pengusaha Bebas Gol. Atas dan sejenisnya | 27 | 447269,8 | 1671,3 | 0,37 |
| Perusahaan | 28 | 1034863,5 | 3827,3 | 0,37 |
| Pemerintah | 29 | 655317,8 | 1669,2 | 0,25 |
| Total | | 3881490,0 | 13922,4 | 0,36 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

buhan sebesar 2,37% serta sektor bangunan dan instalasi listrik, gas, air bersih, dan komunikasi (kode sektor 47) yang meningkat sebesar 627,8 miliar atau tumbuh sebesar 2,30%. Pertumbuhan sektor-sektor produksi tersebut terkait dengan kebijakan instansi teknis penerima dana stimulus infrastruktur terbesar yang mengalokasikannya untuk kegiatan penanggulangan bencana alam, menutup kontrak-kontrak *multiyears* bidang pekerjaan jalan, mendukung ketahanan pangan dan mempercepat pelayanan air minum kepada masyarakat.

Sektor lain di luar infrastruktur yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya (kode sektor 36) yang mengalami kenaikan sebesar 546,4 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,22%, diikuti oleh sektor kehutanan dan perburuan (kode sektor 33) yang mengalami peningkatan sebesar 233,1 miliar atau tumbuh sebesar 0,73% serta sektor industri kayu dan barang-barang dari kayu (kode sektor 39) yang

memperoleh peningkatan sebesar 464,2 miyar atau tumbuh sebesar 0,45%. Pembangunan infrastruktur memerlukan bahan baku yang merupakan *output* sektor-sektor tersebut antara lain pasir, batu, kayu dan produk-produk dari kayu sehingga wajar jika sektor-sektor itu tumbuh.

Structural Path Analysis (SPA) atau analisis jalur struktural telah dilakukan untuk seluruh sektor, namun pada penulisan ini hanya akan mengambil sampel tiga institusi rumah tangga yang menerima pengaruh global terbesar dari sektor infrastruktur bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal (Tabel 7).

Tabel 7 memperlihatkan bahwa tiga golongan rumah tangga yang menerima pengaruh global terbesar dari sektor bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal (kode sektor 44) terdiri dari rumah tangga bukan pertanian perkotaan pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian (kode sektor 27) sebesar 0,214 di mana 8,3% dari pengaruh globalnya dijelaskan melalui faktor produksi bukan tenaga kerja (kode sektor

Tabel 6. Pengaruh Stimulus Fiskal Terhadap Pendapatan Sektor Produksi (dalam Miliar Rp.)

| Sektor | | Kondisi Awal | Perubahan | |
|--|------|------------------|----------------|-------------|
| Nama | Kode | | Nilai | % |
| Pertanian Tanaman Pangan | 30 | 277366,8 | 986,2 | 0,36 |
| Pertanian Tanaman Lainnya (Perkebunan) | 31 | 106281,1 | 312,8 | 0,29 |
| Peternakan dan Hasil-Hasilnya | 32 | 85649,7 | 318,2 | 0,37 |
| Kehutanan dan Perburuan | 33 | 32115,6 | 233,1 | 0,73 |
| Perikanan | 34 | 98387,2 | 350,0 | 0,36 |
| Pertambangan Batubara, Biji Logam, Minyak, dan Gas Bumi | 35 | 354250,4 | 477,1 | 0,13 |
| Pertambangan dan Penggalian Lainnya | 36 | 44643,4 | 546,4 | 1,22 |
| Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau | 37 | 672165,4 | 2182,3 | 0,32 |
| Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit | 38 | 256702,5 | 406,5 | 0,16 |
| Industri Kayu dan Barang-barang dari Kayu | 39 | 103982,3 | 464,2 | 0,45 |
| Industri Kertas dan Logam | 40 | 834341,8 | 2816,1 | 0,34 |
| Industri Kimia, Logam Dasar, Pupuk, dan Sejenisnya | 41 | 725492,2 | 2565,0 | 0,35 |
| Listrik dan Gas | 42 | 88394,0 | 266,3 | 0,30 |
| Air Bersih | 43 | 9350,1 | 30,7 | 0,33 |
| Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal | 44 | 288443,5 | 1368,1 | 0,47 |
| Prasarana Pertanian | 45 | 67671,2 | 1603,0 | 2,37 |
| Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan | 46 | 172437,9 | 4164,7 | 2,42 |
| Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas dan Air Bersih, dan Komunikasi | 47 | 27327,8 | 627,8 | 2,30 |
| Bangunan Lainnya | 48 | 22561,4 | 231,8 | 1,03 |
| Perdagangan | 49 | 507854,2 | 1461,1 | 0,29 |
| Restoran | 50 | 193719,9 | 741,7 | 0,38 |
| Hotel | 51 | 29360,5 | 52,8 | 0,18 |
| Angkutan Darat | 52 | 159571,8 | 578,9 | 0,36 |
| Angkutan Udara, Air, dan Komunikasi | 53 | 201339,8 | 629,5 | 0,31 |
| Jasa Penunjang Angkutan dan Pergudangan | 54 | 38359,3 | 112,9 | 0,29 |
| Bank dan Asuransi | 55 | 174486,8 | 668,5 | 0,38 |
| Real Estate dan Jasa Perusahaan | 56 | 177701,3 | 736,1 | 0,41 |
| Pemerintahan, Jasa Sosial, dan Kebudayaan | 57 | 304410,1 | 984,4 | 0,32 |
| Jasa Perseorangan, Rumah Tangga, dan Lainnya | 58 | 170116,3 | 600,7 | 0,35 |
| Total | | 6224484,4 | 26516,8 | 0,43 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 7. SPA Sektor Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal terhadap Rumah Tangga

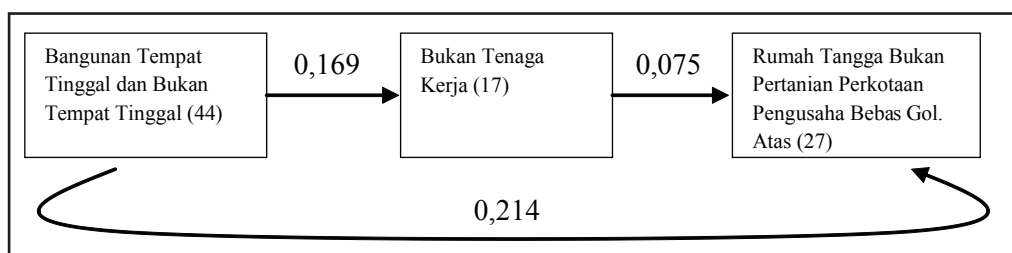
| <i>Path</i> | <i>Global Effect</i> | <i>Direct Effect</i> | <i>Path Multiplier</i> | <i>Total Effect</i> | <i>% of Global</i> |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 44, 17, 27 | 0,214 | 0,013 | 1,403 | 0,018 | 8,3 |
| 44, 6, 25 | 0,206 | 0,037 | 1,216 | 0,045 | 21,7 |
| 44, 5, 22 | 0,156 | 0,034 | 1,159 | 0,039 | 25,1 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

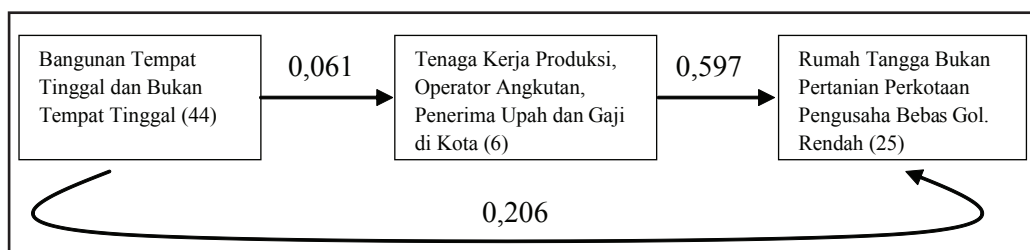
17). Selanjutnya, rumah tangga bukan pertanian di perkotaan pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling hingga buruh kasar (kode sektor 25) sebesar 0,206 di mana 21,7% dari pengaruh globalnya dijelaskan melalui faktor produksi tenaga kerja produksi, operator angkutan hingga buruh kasar penerima upah dan gaji di kota (kode sektor 6). Kemudian rumah tangga bukan pertanian di pedesaan pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling hingga buruh kasar (kode sektor 22) menerima pengaruh global sebesar 0,156 di mana sekitar 25,1% dari pengaruh globalnya dijelaskan melalui faktor produksi tenaga kerja produksi, operator angkutan hingga buruh kasar penerima upah dan gaji di desa (kode sektor 5). Jalur-jalur tersebut merupakan jalur kritis atau *critical path* yang dapat diidentifikasi dari nilai pengganda total atau nilai persentase terhadap pengganda global

yang terbesar. Jalur-jalur tersebut dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.

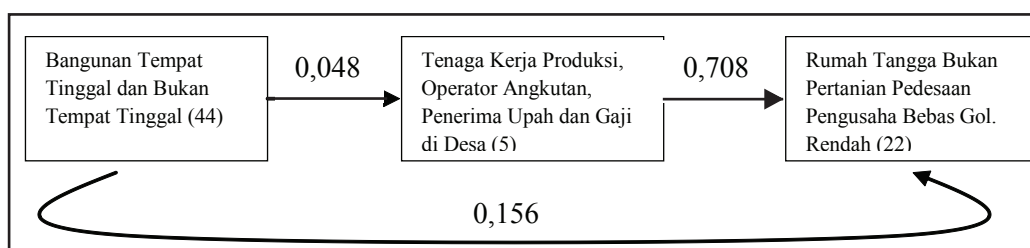
Gambar 1 menunjukkan besarnya pengaruh langsung sektor bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal terhadap faktor produksi bukan tenaga kerja sebesar 0,169. Artinya, setiap kenaikan produksi atau pendapatan sektor bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar satu unit akan meningkatkan pendapatan faktor produksi bukan tenaga kerja sebesar 0,169. Sementara itu, pengaruh langsung faktor produksi bukan tenaga kerja terhadap pendapatan rumah tangga bukan pertanian perkotaan pengusaha bebas golongan atas adalah sebesar 0,075. Dengan demikian, pengaruh langsung sektor bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal terhadap rumah tangga bukan pertanian perkotaan pengusaha bebas golongan atas adalah $0,169 \times 0,075 = 0,012675$ (dibulatkan menjadi 0,013). Analisis yang sama sebagaimana Gambar 1 juga



Gambar 1. Jalur Pengaruh Sektor Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal terhadap Rumah Tangga Bukan Pertanian Perkotaan Pengusaha Bebas Golongan Atas



Gambar 2. Jalur Pengaruh Sektor Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal terhadap Rumah Tangga Bukan Pertanian Perkotaan Pengusaha Bebas Golongan Rendah



Gambar 3. Jalur Pengaruh Sektor Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal terhadap Rumah Tangga Bukan Pertanian Pedesaan Pengusaha Bebas Golongan Rendah

digunakan untuk menganalisis Gambar 2 dan Gambar 3.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simulasi dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan stimulus fiskal infrastruktur berpengaruh terhadap pendapatan faktor produksi, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan sektor produksi. Secara kumulatif pendapatan faktor produksi mengalami pertumbuhan sebesar 0,40%, pendapatan institusi mengalami pertumbuhan sebesar 0,36%, dan pendapatan sektor produksi mengalami pertumbuhan sebesar 0,43%.
- 2) Sektor-sektor yang memperoleh manfaat paling besar dengan adanya stimulus fiskal tersebut adalah:
 - a. Faktor produksi tenaga kerja produksi, operator angkutan, manual dan buruh kasar, serta tenaga kepemimpinan, ketatalaksanaan, profesional, dan teknisi yang ada di desa dan di kota.
 - b. Institusi rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah, baik yang ada di desa dan di kota.
 - c. Sektor jalan, jembatan dan pelabuhan, sektor prasarana pertanian dan sektor bangunan dan instalasi listrik, gas, air bersih dan komunikasi.
 - d. Sektor lain di luar infrastruktur yang memperoleh *multiplier effect* dari stimulus fiskal tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalian lainnya, sektor kehutanan dan perburuan dan sektor industri kayu dan barang-barang dari kayu, sektor pertanian, sektor industri, sektor transportasi dan sektor jasa-jasa.
- 3) Berdasarkan analisis jalur struktural dapat diketahui bahwa golongan rumah tangga yang menerima pengaruh global terbesar dari sektor infrastruktur adalah rumah tangga bukan pertanian pengusaha bebas

golongan atas dan golongan rendah, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan. Pengaruh global terbesar tersebut melalui beberapa jalur faktor produksi, yaitu faktor produksi bukan tenaga kerja dan tenaga kerja produksi, baik yang ada di kota maupun di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Djoni Hartono selaku dosen pembimbing tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada penulis. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Dwi Purwoko selaku pembimbing pada Diklat Teknis Fungsional Peneliti Tingkat Pertama atas bimbingan dan arahnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Kementerian Keuangan. 2009. "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009". Direktorat Jenderal Anggaran.
- ²Badan Pusat Statistik. 2010. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jakarta". Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XIII.
- ³Badan Pusat Statistik. 2010. "Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2009". Jakarta. Berita Resmi Statistik No. 07/02/Th. XIII.
- ⁴Kementerian Keuangan. (2009). "Surat Edaran Nomor 883/MK.02/2009 Tanggal 4 Maret 2009 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 812/MK.02/2009 Tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi dan Penjaminan Untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009". Jakarta.
- ⁵Case, Karl E., dan Fair, Ray C. 1999. *Principles of Economics*. Fifth Edition. Prentice Hall International, Inc.
- ⁶Musgrave, Richard A., Musgrave, dan Peggy B. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition. McGraw Hill Book Company.
- ⁷Ikhsan, M. Santosa, Agus dan Harmanti. 2006. "Administrasi Keuangan Publik". Jakarta: Universitas Terbuka.

- ⁸ Suminto. 2004. “Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara”. *Makalah Sebagai Bahan Penyusunan ‘Budget in Brief 2004’*. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
- ⁹ Mahi, B. Raksaka. 2009. “Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal”. *Bahan Kuliah Keuangan Negara*. Universitas Indonesia.
- ¹⁰ Abimanyu, Anggito. 2005. “Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro-Modfi dan CGE Indorani”. Jakarta. *Jurnal Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic Journal)*. No. 1.
- ¹¹ The World Bank. 1994. *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Executive Summary. Washington, D.C.
- ¹² Kwik Kian Gie. 2002. “Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman”. Bandung. Studium General Institut Teknologi Bandung.
- ¹³ Badan Pusat Statistik. 2008. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- ¹⁴ Thorbecke, Erik et al. 1992. *Adjustment and Equity in Indonesia*. Paris: Development Centre of The Organisation for Economic Co-operation and Decelopment (OECD).
- ¹⁵ Hartono, Djoni., Resosudarmo, dan Budi P. 1998. “Eksistensi Matriks Pengganda dan Dekomposisi Matriks Pengganda Pyatt dan Round dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi”. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 46(4): 473–496.
- ¹⁶ Azis, Iwan Jaya., dan Mansury, Yuri. 2003. “Measuring Economy-wide Impacts of a Financial Shock”. *ASEAN Economic Bulletin Vol. 20*, No. 2, pp. 112–27.

